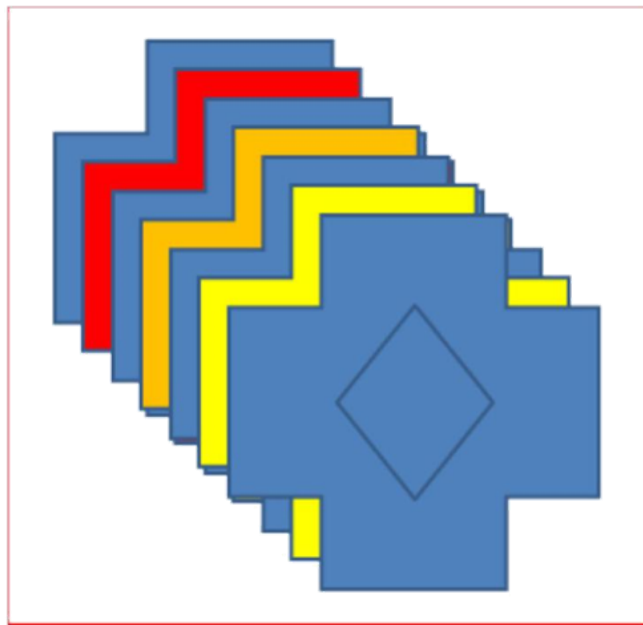




RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA JAMBI 2013-2018



PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah/wilayah menuntut untuk dilakukannya suatu perubahan yang berarti dan mengarah kepada kemandirian yang berorientasi kepada kesempatan untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam memajukan daerahnya.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penjabaran perencanaan pembangunan daerah dalam Renstra masing-masing SKPD yang tepat amatlah diperlukan sebagai pedoman keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, tak terkecuali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik akan memberikan kewenangan kepada SKPD dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD. Pemberian kewenangan kepada Badan dalam

penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kota secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan kewenangan dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan susunan struktur yang ada diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis, maka hal tersebut di atas perlu didukung oleh aparatur yang professional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja Badan yang baik dan sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat.

Atas dasar pemikiran di atas, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip kerja yang baik, keinginan ini telah menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dituangkan dalam bentuk perencanaan sehingga merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Badan. Perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan perlu dirumuskan dan disusun dalam bentuk “Perencanaan Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Perencanaan strategik disusun berdasarkan kegiatan strategis yang menyangkut upaya pembinaan Kesatuan Bangsa dan kondisi sosial politik yang aman, maka akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pada akhirnya dijadikan dasar akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan akan dilaporkan setiap akhir tahun sebagai

pencerminan pertanggungjawaban Kepala Badan terhadap kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Walikota.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2013 – 2018, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013–2018 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Kepmendagri No. 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya, yang diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Badan-Badan Daerah Kota Jambi.
13. Inmendagri No. 10 Tahun 1997 tentang Pembinaan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G. 30.S/PKI;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025.
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi; Disamping Landasan Normatif diatas, dikemukakan juga Landasan Materil sebagai berikut:
 - a. Masukan, Saran, Pendapat, Inspirasi dan Aspirasi unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai hasil Konsultasi perumusan Visi dan Misi.
 - b. Indentifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 oleh Kelompok Kerja Penyusunan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai Tim terpadu antara unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2013 – 2018, dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur yang ada di Badan dalam menciptakan keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab sekaligus dapat memberikan motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas dalam mencapai kebersamaan program Badan.

Tujuan Penyusunan Perencanaan Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, adalah:

1. Membangunan sistem akuntabilitas kinerja Badan sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pegawai Badan dan unsur masyarakat.
3. Menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan.
4. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja Badan sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa 2013-2018 sebagai berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan**, terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol dan Sistematika Penulisan;
- **Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa Sumber Daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi sebagai peluang untuk meningkatkan mengembangkan pelayanan melalui Renstra SKPD;
- **Bab 3 Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**, memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

- **Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan** terdiri atas: Uraian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Tujuan merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan;
- **Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif** memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD dalam 5 tahun kedepan;
- **Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD** memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3). Kemudian diubah lagi dengan peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mengalami perubahan dalam tugas pokoknya yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

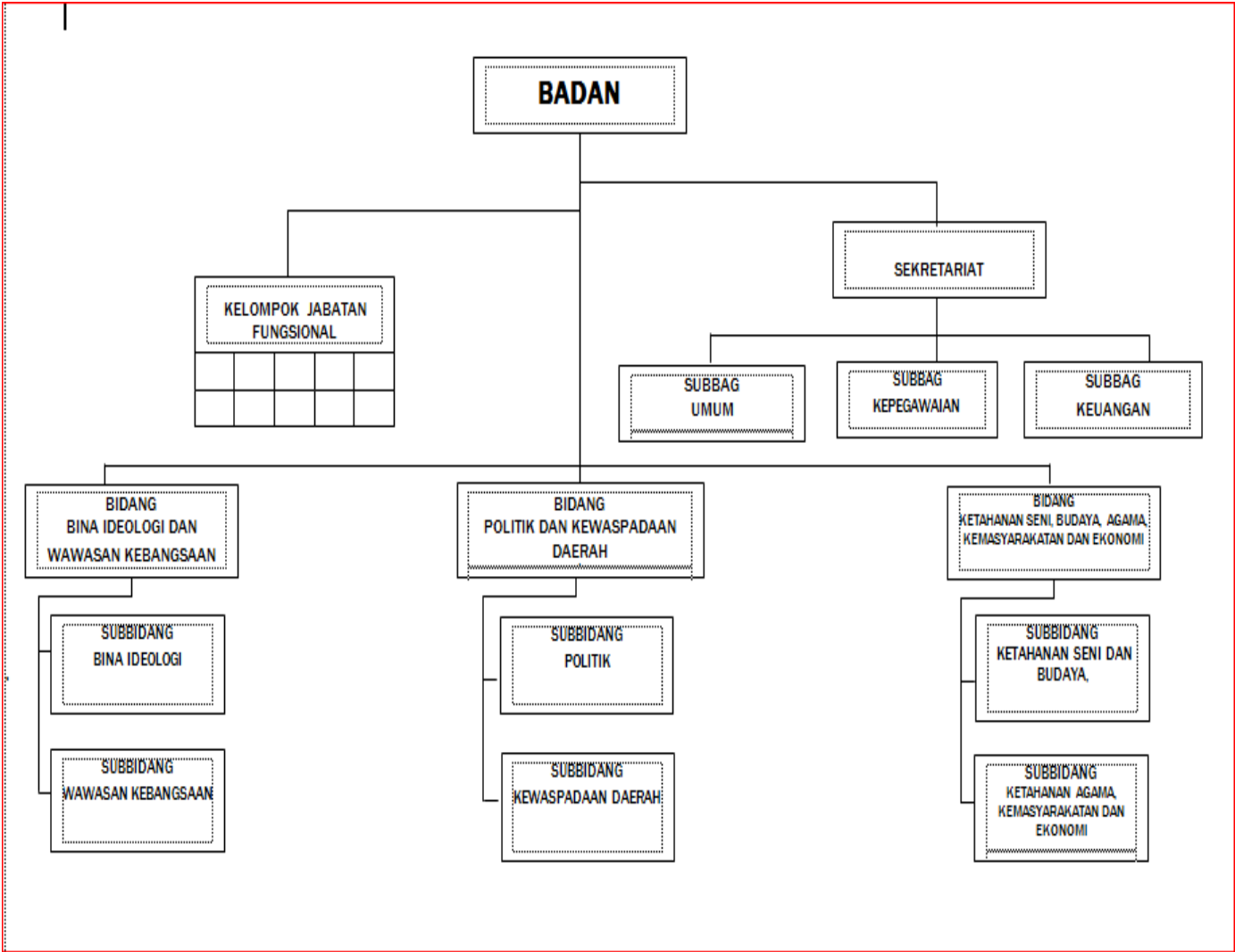
Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Politik
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Daerah
5. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama
 - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Jambi



A. Kepala Badan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksaaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
- e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Tugas Pokok: membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
- b. pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan;

- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- e. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan

Tugas Pokok: membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan koordinasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah

Tugas Pokok: membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

E. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Tugas Pokok: membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

F. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan peraturan walikota.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) termasuk sumber daya manusia aparatur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Apabila dikatakan bahwa sumber daya manusia menempati posisi sentral dan kunci dalam mewujudkan kinerja pembangunan tidaklah

dapat disanggah, karena SDM merupakan unsur yang esensial dan modal dasar pembangunan.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja tersebut pemerintah senantiasa meningkatkan kemampuan aparatnya melalui penataran-penataran, pelatihan maupun dengan pendidikan penjenjangan.

Sejalan dengan kondisi di atas dan sesuai dengan perubahan Kantor Sosial Politik Kota Jambi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3), maka untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi perlu mendapat dukungan dari aparatur dan masyarakat dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berada dan merupakan wadah/tempat pengkajian masalah strategis dan sebagai perlindungan masyarakat dalam membina kesatuan bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Jambi dan untuk mendukung perkembangan Kota Jambi yang semakin pesat, maka peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sangat dituntut agar mampu mengakomodir segala permasalahan yang timbul pada masyarakat. Bertitik tolak dari tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terlihat jelas bahwa sumber daya aparatur sangat menentukan dalam kegiatan organisasi, dimana dengan keterbatasan kemampuan

sumber daya manusia, maka suatu kebijakan yang dibuat akan kurang berhasil apabila tidak didukung oleh kemampuan personil dalam melaksanakan tugas organisasi. Pada tabel 2.1 kita melihat kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol	1				
2	Sekretariat		1	3	5	9
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah		1	2	3	6
4	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		1	2	3	6
5	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		1	2	2	5
6	Pejabat Fungsional					
	JUMLAH	1	4	9	13	27

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di secretariat yang cukup tinggi. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol		1					
2	Sekretariat	2	5	1	1			9
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah	1	5					6
4	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		5	1				6
5	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		4		1			5
6	Pejabat Fungsional							
	JUMLAH	3	20	2	2			27
	%	11,11	74,07	7,41	7,41	0	0	100%

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Badan Kesbangpol yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 20 orang (74,07%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Badan Kesbangpol yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Kesbangpol secara umum. Jumlah karyawan Badan Kesbangpol yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 3 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 11,11 % dari seluruh karyawan Badan Kesbangpol, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai lembaga pemersatu bangsa secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Badan Kesbangpol Kota Jambi adalah mengenai kualitas sesuai dengan bidangnya. Sekalipun penempatan telah berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman yang ada.

2.2.2. Anggaran

Dilihat dari sisi anggaran, Badan Kesbangpol Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ketahun, meskipun peningkatan ini tidak signifikan, table dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dari tahun 2008-2015 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2008-2015

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2008	2.912.200.761	2.658.808.845	91,78
2	2009	2.611.716.600	2.417.294.350	92,56
3	2010	2.750.641.110	2.634.825.594	95,79
4	2011	2.884.964.735	2.680.540.122	92,91
5	2012	3.903.969.494	3.526.590.859	90,33
6	2013	4.683.447.363	4.167.779.480	88,99
7	2014	5.220.668.525	4.792.578.014	91,80
8	2015	5.346.136.474	4.616.452.061	86,35

Sumber: Hasil olahan Perda APBD

Pada table 2.3 diatas terlihat bahwa peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Badan Kesbangpol juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Badan Kesbangpol Kota Jambi sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Badan Kesbangpol Kota Jambi menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berada di jalan Kapten Sujono, lapangan tembak Kota Baru Jambi dan mulai digunakan oleh Badan Kesbangpol pada tahun 2004. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung kinerja Badan Kesbangpol Kota Jambi dapat dilihat pada table 2.4

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Badan Kesbangpol Kota Jambi
Tahun 2015

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	4	Baik
2	Kendaraan roda 2	9	Baik
3	AC	10	Baik
4	Lemari/rak/buffet/filling cabinet	9	Baik
5	Filling cabinet	10	
6	Brankas	2	Baik
7	Meja	46	Baik
8	Kursi	66	Baik
9	Kursi tamu	2	Baik
10	Pesawat telepon/faks	1	Baik
11	Komputer	10	Baik
12	Note book/laptop	10	Baik
13	Printer	12	Baik
14	Scanner	1	Baik
15	Mesin tik	4	Baik
16	Projector	3	Baik
17	Layar	1	Baik
18	Camera digital	4	Baik
19	Kipas angin	2	Baik
20	Dispenser	2	Baik
21	Kulkas	1	Baik

Lokasi Badan Kesbangpol Kota Jambi berada tidak jauh dari kantor-kantor pemerintah lainnya meskipun terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Jambi di Jl. Basuki Rahmat Kota Baru, Kota Jambi. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Badan Kesbangpol Kota Jambi berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran beberapa tahun yang lalu telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya partial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Badan Kesbangpol, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Badan Kesbangpol.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kota Jambi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui program dan kegiatannya, antara lain:

1. Melakukan pelayanan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai sarana dalam memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah dan masalah lain yang terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Dengan FKUB ini dimana sekretariatnya ada pada Badan Kesbangpol juga membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan kerukunan umat beragama.
2. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan Ormas yang ada di Kota Jambi dengan memberikan sosialisasi terkait dengan peran Ormas dalam mengisi pembangunan daerah di Kota Jambi
3. Melakukan pemantauan akan perkembangan politik di Kota Jambi untuk melihat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Ini akan terlihat khususnya pada saat adanya Pemilu.
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing yang ada di Kota Jambi. Agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan aman.
5. Melakukan pemantauan dalam kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dengan melakukan deteksi agar tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat dan apabila telah terjadi maka dengan tim PKS dapat menekan dan menghilangkan sumber konflik serta menyelesaikan masalah yang berakibat konflik tersebut.
6. Memberikan pembinaan dan sosialisasi melalui kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) dengan memberikan pembekalan khususnya kepada generasi muda untuk tidak terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang sifatnya makar, pergaulan bebas, penyalahgunaan pemakaian narkoba dan kegiatan menyimpang lainnya yang dapat merusak dan menghancurkan harapan masa depan generasi muda kedepan.

7. Memberikan pembinaan dan sosialisasi melalui kegiatan Orientasi Pembauran Bangsa (OPB) dengan menciptakan masyarakat yang majemuk dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ras, suku dan etnis tertentu. Dengan pembekalan akan jiwa persatuan dan kesatuan dari keberagaman tersebut dapat menciptakan kondisi yang mampu untuk mengisi pembangunan daerah dimana mereka berada sesuai dengan kemampuan dan kontribusi yang mereka berikan kepada Kota Jambi
8. Memfasilitasi dengan kegiatan Nation Character Building (NCB) yang dapat meningkatkan karakter para pemimpin yang baik khususnya seluruh pejabat mulai dari eselon IV sampai dengan pejabat eselon II. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan yang telah difasilitasi Badan Kesbangpol Kota Jambi dapat menjalankan kepemimpinannya dengan norma, sikap dan tingkah laku yang terpuji sebagai pemimpin yang dicintai oleh bawahannya.
9. Memberikan pelayanan berupa pemberian rekomendasi izin kepada mahasiswa maupun masyarakat yang melakukan penelitian di Kota Jambi ataupun mengadakan kegiatan acara tertentu.
10. Memberikan pelayanan terhadap kelompok kegiatan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan sejenis seperti kelompok tani. Dengan memberikan surat keterangan terdaftar untuk kelompok kegiatan tersebut, apabila kelompok tersebut mendaftarkan kelompoknya kepada Badan Kesbangpol Kota Jambi.

11. Memberikan pelayanan terhadap Ormas dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas yang mendaftarkan diri pada Badan Kesbangpol Kota Jambi dan juga meminta agar Ormas tersebut untuk setiap tahunnya melaporkan tentang keberadaan dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun tersebut dan meregistrasi ulang SKT nya.
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan masyarakat dengan berkembangnya aliran kepercayaan yang memungkinkan selalu ada untuk menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan melanggar norma-norma dan tatanan-tatanan kehidupan yang sudah ada. Dengan Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol berupa kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
13. Memberikan pelayanan dengan memfasilitasi kegiatan dalam mengantisipasi timbulnya gerakan-gerakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan serta ketertiban di Kota Jambi dari sekelompok orang atau masyarakat berupa gerakan radikal, separatis, teroris dan gerakan-gerakan lainnya yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Memberikan pelayanan dengan memfasilitasi kegiatan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul atau menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya di Kota Jambi, dalam rapat koordinasi pimpinan daerah melalui kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang biasa langsung dipimpin Oleh Bapak Walikota Jambi.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penyelesaian masalah keagamaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
2	Persentase penurunan angka konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan/etnis				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui Orkemas				5%	5%	5%	5%	5%	1%	1%	1,6%			20%	20%	32%		
4	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berdemokrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

2.4.1. Tantangan

a. Kurang meratanya aparat yang professional

Aparat yang profesional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang merata sehingga sikap profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan belum tercapai, sementara kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi tersebut.

b. Kemampuan Penguasaan Teknologi

Masih sangat terbatasnya kemampuan teknologi dari staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi guna mendukung kegiatan organisasi sangat terbatas, seperti peralatan komputer, kendaraan dinas dan sebagainya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya hambatan atau keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan operasional sehingga berakibat efisiensi dan efektifitas organisasi menjadi tidak tercapai. Untuk terwujudnya, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana diharapkan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya menunjang pelaksanaan operasional kegiatan rutin/pekerjaan sehari-hari, baik sarana mobilisasi berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua untuk kelancaran kegiatan dilapangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sudah cukup memadai. Demikian juga dengan ruang kantor atau yang ditempati saat ini sudah cukup memadai dalam melakukan aktivitas kerja sehari-

hari. Meskipun demikian tentunya masih terdapat kekurangan yang meskipun tidak begitu signifikan.

d. Rendahnya Sinergi Koordinasi

Masih rendahnya sinergisitas Koordinasi dalam penyelesaian kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga mekanisme hubungan kerja antara pihak-pihak terkait belum optimal hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas Badan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara baik, namun karena yang memerlukan koordinasi dengan SKPD lain guna mengatasi hal-hal yang terjadi di masyarakat belum optimal maka sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya. Misalnya permasalahan dibidang sosial masyarakat, dimana koordinasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, sementara kehadiran instansi terkait masih selalu tidak tepat waktu dan diwakilkan kepada yang tidak menguasai sehingga kesulitan dalam mengambil kebijakan/keputusan yang tepat dan cepat.

e. Masih terdapat perbedaan persepsi tentang keberadaan LSM

Perbedaan Persepsi ini sehingga menghambat pembinaan organisasi dan kegiatan LSM di daerah. Hal ini sebagai akibat sikap dan perilaku sebagian anggota/pengurus belum konsisten dengan AD/ART organisasi, sehingga tidak jarang terjadi kemelut dalam organisasi. Selain itu masih ada sebagian dari masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kurang Tepat Sasaran

Untuk kegiatan-kegiatan tertentu pada pelaksanaannya masih banyak yang menjadi peserta bukan lah peserta yang diharapkan atau sesuai

dengan yang diundang. Ada juga utusan dari yang di undang dari tahun ke tahun pesertanya itu itu saja. Sehingga dari segi penyebaran pengetahuan dan informasi menjadi terbatas dan kurang tepat sasaran.

g. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

Seringkali dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala waktu yang tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, sehingga adanya keterbatasan waktu yang seharusnya dapat diberikan informasi yang lebih menjadi berkurang. Hal ini bisa terjadi karena lambatnya pembukaan kegiatan yang dimaksud atau karena lambatnya peserta yang menghadiri acara tersebut.

h. Masih lamban dan kurang dalam implementasi pelaksanaan kegiatan

Terjadinya suatu kegiatan yang menyimpang dan jelas bertentangan dengan aturan seringkali berlangsung lama tanpa diketahui atau belum bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini membuat kejadian dengan permasalahan yang sama dapat berulang-ulang, sehingga implementasi dari aturan dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak begitu efektif adanya.

Secara umum hambatan selalu terjadi dalam menghadapi berbagai masalah, namun secara prinsip hambatan ini masih dapat diatasi sekalipun hasilnya masih belum memuaskan. Saat ini hambatan yang dihadapi badan dalam pelaksanaan tugas operasinya diantaranya adalah:

2.4.2. Peluang (Opportunity)

Dalam Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, peluang merupakan berbagai situasi lingkungan yang

menguntungkan bagi Dinas dalam upaya mencapai tujuan. Adapun peluang yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi Kota Jambi yang kondusif, semangat reformasi yang menginginkan perubahan pradigma disegala bidang telah bergulir dan terlaksana, dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip good goverment dapat dilaksanakan.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa, peran serta masyarakat dalam aspek pembangunan mewujudkan arah kedepan yang cukup baik dan jiwa kebersamaan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa memotivasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
- c. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi global yang semakin canggih, maka akibatnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan perkembangan itu sendiri.

Untuk itu dimasa depan hendaknya perlu ditingkatkan penggunaan peralatan yang bersifat teknologi dalam menunjang proses kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Kekuatan (Strong)

Merupakan faktor-faktor yang dimiliki organisasi dan berakibat sebagai suatu keunggulan komperatif dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang politik. Tersedianya peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan dibidang politik. Pedoman tersebut adalah Undang-undang, Peraturan-peraturan dan ketentuan lainnya dibidang politik.

Tersedianya juga peraturan perundang-undangan yang dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang kewaspadaan dini atau kewaspadaan daerah.

- b. Sudah tersedianya pegawai yang memiliki standar pendidikan formal yang cukup memadai dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai visi dan misinya dan visi dan misi Walikota Jambi.
- c. Adanya dukungan pimpinan dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka menghadapi tugas-tugas dibidang sosial politik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti demo, kerusuhan dan aktivitas lain yang membuat instabilitas di Kota Jambi serta hal-hal lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, pimpinan selalu tanggap dan memberi respon yang baik sehingga masalah dapat diatasi secara cepat dan tepat. Hal ini sangat membantu badan dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Ada beberapa permasalahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Jambi, antara lain:

a. Pendirian Rumah Ibadah

Sebagaimana dalam Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi. Kemudian terkait masalah pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan menteri bersama yang dapat menimbulkan gesekan antar umat beragama. Dalam hal ini khususnya pendirian rumah ibadah umat kristiani.

b. Munculnya ajaran atau aliran kepercayaan yang menyimpang

Untuk kegiatan yang terkait dengan agama, perlunya antisipasi akan adanya penyimpangan ajaran agama atau munculnya aliran-aliran atau ajaran-ajaran baru yang bersifat sesat dan menyesatkan. Kemunculan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama ini sangat sering munculnya setelah beberapa lama ajaran tersebut dilakukan oleh masyarakat.

c. Perilaku Ekonomi Masyarakat

Untuk kegiatan yang terkait dengan ketahanan ekonomi dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang rawan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam perilaku ekonomi seperti Distribusi gas elpiji khususnya gas elpiji 3 Kg, kelangkaan dan

adanya pemindahan tabung gas yang bersubsidi ke tabung gas yang non subsidi.

d. KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PROFESI DAN LSM

Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi (pikiran dan pendapat) bagi anggota masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM dalam Kota Jambi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat kota dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan kota sebagai bagian pembangunan nasional guna tercapainya pembangunan kota yang mandiri dan terkoordinasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Inmendagri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Masyarakat (LSM) serta PP Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985, pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa : “Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk pengurusnya memberitahukan secara teertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya”. Dan pada ayat 3 dikatakan “Pemberitahuan sebagaimana dalam ayat 2 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan AD/ART dan Susunan Pengurus”.

Sesuai dengan kondisi diatas pada saat ini masih banyak organisasi kemasyarakatan yang belum memberitahukan keberadaannya pada Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Jambi sesuai keberadaan organisasi tersebut, sehingga kadang-kadang

dapat menimbulkan miskomunikasi diantara pemerintah dengan organisasi yang ada, sementara pada peraturan jelas dikatakan bahwa pemerintah merupakan lembaga pembinaan umum atas keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Ini berarti peran pemerintah adalah sebagai fasilitator.

Hal demikian sesuai pula dengan Keputusan Walikota Jambi Nomor 62 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bagian dan Sub-Sub Dinas serta Uraian Tugas Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, dimana salah satu tugas pokok itu adalah Pendataan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM serta Fasilitasi Pertemuan dengan Organisasi tersebut.

Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberitahukan/mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah sebanyak 168 organisasi, dimana menurut perkiraan kami jumlah ini baru sebagian dari seluruh organisasi yang ada dalam Kota Jambi. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar pada Pemerintah Kota Jambi sampai dengan keadaan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3, dari 168 organisasi masyarakat yang ada, hanya 32 organisasi yang aktif dan sisanya sebanyak 132 organisasi yang tidak aktif.

Sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi telah melakukan inventarisasi keberadaan organisasi yang sudah terdaftar dan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pengkoordinasian dan pemantauan terhadap organisasi yang belum terdaftar, hal ini dilakukan mengingat tugas dan fungsi yang melekat pada badan. Sedangkan untuk Organisasi Sosial Politik (Orsospol) yang ada dalam

Kota Jambi berjumlah 12 buah, yaitu yang mengikuti atau sebagai peserta Pemilu tahun 2013, sebagaimana terdapat pada tabel 4. Jumlah orsospol ini disesuaikan dengan keberadaan organisasi tersebut pada tingkat Pusat dan Propinsi serta Kota/Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tidak semua organisasi yang terdaftar di Pusat juga terdaftar di Kota Jambi, karena jumlah keberadaannya harus meliputi sebagian besar Kota/Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada organisasi ini hanya sebatas menginventarisasi keberadaannya serta memonitor kegiatannya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Jambi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang diselaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2011–2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2025. Visi dan misi Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 dirumuskan sebagai berikut :

VISI:

**TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI
PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA
BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN
BERBUDAYA**

Pusat Perdagangan dan Jasa : Sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana zonasi RTRWK pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal dan regional

Berbasis Masyarakat : *Community Based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia

untuk menerima perubahan.

- Berakhlak** : Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
- Berbudaya** : Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

MISI:

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kota Jambi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah.
- 3) Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (*Clean Governance*)
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Prioritas Pembangunan

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2013–2018, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur,
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,
- (3) Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi,

- (4) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
- (6) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial

Sasaran

Pemerintah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2015 dalam mencapai 6 (enam) Prioritas Pembangunan memformulasikan 22 sasaran utama yang akan dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Prioritas 1

PERCEPATAN PENINGKATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan
2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas
3. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan

Prioritas 2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata
5. Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua
6. Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama
7. Terciptanya lapangan pekerjaan
8. Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing
9. Terkendalinya angka kelahiran penduduk
10. Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan

Prioritas 3

PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN

INVESTASI

11. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas koperasi
12. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional
13. Terciptanya ruang representatif bagi PKL
14. Terwujudnya peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar

Prioritas 4**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

15. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik
16. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan
17. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas

Prioritas 5**PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

18. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH
19. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan

Prioritas 6**PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

20. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS
21. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga
22. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Sesuai dengan Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah dalam sebuah proses pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama periode 2013 – 2018 serta SKPD pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2013 – 2018
dan SKPD Penanggung Jawab

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Rasio panjang jaringan jalan baik	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Rasio Panjang drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman	Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman
6.	Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang	Dinas Perhubungan
7.	Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas	Dinas Perhubungan
8.	Angka Partisipasi Sekolah pada usia sekolah	Dinas Pendidikan
9.	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)	Dinas Pendidikan
10.	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Dinas Pendidikan
11.	Jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	RSUD Abdul Manap
13.	Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam	Dinas Kesehatan
14.	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	Badan Kesbangpol

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
----	-------------------------	-----------------------

15.	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
16.	Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM, IKM dan Koperasi	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
17.	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
18.	Cakupan perempuan & anak korban kekerasan yg mendapat penanganan pengaduan	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
19.	Cakupan perempuan & anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
20.	Kelurahan layak anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
21.	Jumlah Koperasi aktif	Dinas Koperasi & UMKM
22.	Jumlah UMKM dan IKM mandiri	Dinas Koperasi & UMKM
23.	Realisasi investasi	BPM PPT
24.	Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah	Dinas Pasar
25.	Rasio PKL yang tertata	Dinas Pasar
26.	Cakupan bina perdagangan / usaha informal	Dinas Perindustrian & Perdagangan
27.	Pertumbuhan industri	Dinas Perindustrian & Perdagangan
28.	Indeks kepuasan masyarakat	BPM PPT
29.	Kinerja pelayanan internal SKPD	Dinas Pengelola Keuangan & aset Daerah
30.	Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian	Badan Kepegawaian Daerah
31.	Rasio ketaatan terhadap RTRW	Dinas Tata Ruang & Perumahan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
32.	Rasio RTH terhadap luas wilayah	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
33.	Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku & S. Asam	Badan Lingkungan Hidup
34.	Cakupan penanganan sampah	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
35.	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun	Dinas Sosial & Tenaga Kerja

36.	Persentase penduduk miskin	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
37.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
38.	Terselenggaranya Event Berskala Nasional / Internasional	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2013-2018.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

1. Strategi

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selama periode 2013 - 2018 dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemantapan peran dan fungsi kota
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
3. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan

4. Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya
5. Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa
6. Peningkatan mutu dan akses pendidikan
7. Peningkatan mutu dan akses kesehatan
8. Peningkatan toleransi antar umat beragama
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
10. Penurunan angka kelahiran
11. Peningkatan peran perempuan di Pemerintahan
12. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
13. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
14. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS
15. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olahraga
16. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata

2. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi kebijakan sebagaimana tertera di atas, maka dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2013–2018 yang memuat 5 misi, 11 tujuan, dan 21 sasaran. Arah Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/ bidang/ sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah kebijakan dari sasaran dan strategi pada tujuan misi, sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan	• Pemantapan peran dan fungsi kota • Peningkatan peran serta	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan

Perkotaan yang berkualitas	prasarana dasar lingkungan perkotaan 2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas	masyarakat dan swasta	infrastruktur dasar
Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman	3. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan		Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan
Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan	4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH	• Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	• Menata, mengelola dan memantapkan ruang kota dan LH • Meningkatkan dan memperluas RTH
	5. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	• Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya • Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	Meningkatkan kinerja dan cakupan pengelolaan persampahan

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis	6. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas koperasi	Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa	Mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru
	7. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional		
	8. Terciptanya ruang representatif bagi PKL		
	9. Terwujudnya		

potensi daerah	peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar		
----------------	--	--	--

Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata	Peningkatan mutu dan akses pendidikan	• Meningkatkan rasio populasi usia sekolah • Meningkatkan mutu tenaga pendidik • Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan	11. Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua	Peningkatan mutu dan akses kesehatan	• Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis • Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan • Meningkatkan pelayanan kesehatan
Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama	12. Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	Peningkatan toleransi antar umat beragama	Meredam potensi konflik antar umat beragama
Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja	13. Terciptanya lapangan pekerjaan	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja
	14. Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing		
Peningkatan Kesejahteraan Gender di semua aspek pembangunan	15. Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Penurunan angka kelahiran	Mendorong partisipasi aktif Pasangan Usia Subur
	16. Terwujudnya	Peningkatan	Meningkatkan

	peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan	peran perempuan di Pemerintahan	posisi perempuan dalam jabatan pemerintahan
--	--	---------------------------------	---

**Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih
(Clean Governance)**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government)	17. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik	Menerapkan SOP dalam pelayanan publik
	18. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan Standar Pelayanan Minimal
	19. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas		

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	20. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS	Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS	- Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan penanganan PMKS - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
	21. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga	Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan

		budaya dan olahraga	olahraga
	22. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata `	Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata	• Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tujuan wisata • Memberdayakan lembaga adat dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah • Meningkatkan promosi dan pelayanan kepariwisataan

5. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran, sebagai berikut.

Tabel. Program Untuk Pencapaian Sasaran

MISI		SASARAN	PROGRAM
I.	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas	2. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
		Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan	3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan
		Terwujudnya	4. Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perpajakan 5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan 6. Peningkatan Pengelolaan

		pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan	Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati 7. Perencanaan Tata Ruang 8. Penurunan Beban Pencemaran 9. Peningkatan pengelolaan persampahan
2	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BERBASIS POTENSI LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH	Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas koperasi Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional Terciptanya ruang representatif bagi PKL	1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4. Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan dan Industri 5. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 6. Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan 7. Pemberdayaan Masyarakat 8. Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran 9. Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah
3	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama Terciptanya lapangan	1. Peningkatan Akses, mutu dan tata kelola pendidikan 2. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan 3. Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6. Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat

		pekerjaan	7. Koordinasi Keagamaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
		Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing	8. Peningkatan Kualitas,Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Terkendalinya angka kelahiran penduduk	9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan	10. Peningkatan Kesetaraan Gender dan perempuan dan perlindungan anak
4	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (<i>CLEAN GOVERNANCE</i>)	Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik
		Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan	2. Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
		Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas	3. Peningkatan Kerjasama Daerah
			4. Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan
			5. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan
			6. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan
			7. Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah
			8. Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah
			9. Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah
			10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda & Kerumahtanggan
			11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah
			12. Peningkatan pelayanan

			kedinasan DPRD 13. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah 14. Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 15. Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 16. Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi 17. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol 18. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 19. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 20. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani 4. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 5. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan 6. Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2013 bahwa Ormas harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi kemasyarakatan harus dibina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjadi mitra pemerintah. Tahun 2016 tercatat dan terpantau 6 (enam) Aksi demonstrasi yang diantaranya dilakukan oleh beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kota Jambi, angka 6 ini mungkin hanya sebagian besarnya saja yang terpantau oleh Badan Kesatuan Bangsa Kota Jambi dan ini merupakan hal yang perlu masih menjadi perhatian. Maka peran BKBP Kota Jambi dalam membina dan mensosialisasikan program dan peraturan pemerintah untuk mengurangi aksi tersebut sangatlah penting.

Persoalan yang terkait dengan permasalahan keagamaan, untuk di Kota Jambi tidak terdapat permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan Kota Jambi. Yang ada hanya permasalahan pendirian rumah ibadah dan ini telah diambil langkah-langkah konkrit agar masalah yang timbul tidak berdampak luas di masyarakat. Selama tahun 2016 dalam penyelesaian pendirian rumah ibadah mengedepankan musyawarah dan mufakat. Sehingga sebagian besar permasalahan ini tidak meluas kemana-mana. Namun untuk lebih menertibkan pendirian rumah ibadah ini tahun depan akan diminta kepada seluruh masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah untuk membuat izin mendirikan bangunannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan pendirian rumah ibadah di kemudian hari.

Kondisi lingkungan masyarakat saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena pengaruh dampak negatif dari perkembangan kemajuan jaman baik dari ilmu dan teknologi yang dapat menyebabkan perubahan pola perilaku dan ahlak. Terus perlu disikapi dengan bijaksana dan memaksimalkan perhatian seperti pada penggunaan obat-obat terlarang (Narkoba) khususnya pada generasi muda yang sudah sangat mengkhawatirkan, perubahan pola pikir dan perilaku yang apatis. Masyarakat kita yang saat ini mudah ikut-ikutan, terhasut oleh ungkapan-ungkapan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, harus segera dicarikan solusinya. Saat ini untuk sosialisasi sudah banyak dilakukan baik tentang Pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan sosialisasi lainnya yang bersifat bagaimana meningkatkan persatuan dan kesatuan sebagai NKRI.

Banyak sekali masyarakat kita khususnya generasi muda yang sudah mulai meninggalkan sikap-sikap moral yang baik dan akhlak kesantunan. Disamping itu dikhawatirkan juga untuk masuknya paham-paham radikalisme dan paham-paham asing serta aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan akidah, seperti yang pernah ada di Kota Jambi. Ada warga yang masuk dalam Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dimana gerakan ini awal mulanya banyak berperan dalam kemasyarakatan, namun diakhir-akhir sebelum dinyatakan bahwa gerakan ini sangat bertentangan dengan akidah umat khususnya umat islam. Oleh karena itu gerakan ini dinyatakan perlu di tertibkan. Untuk itu tahun depan tetap terus dilanjutkan kegiatan-kegiatan Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba, penguatan akhlak, moral dan perilaku santun dalam bermasyarakat serta menjaga jangan sampai masuknya pengaruh radikalisme dan paham-paham asing serta aliran kepercayaan yang dapat merusak akidah masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Rumusan Visi merupakan hal yang penting, karena mencerminkan apa yang ingin dicapai dimasa depan dan sebagai tujuan jangka panjang serta kemauan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi akan diarahkan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka dapat dirumuskan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT KOTA JAMBI MELALUI STABILITAS POLITIK DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK”.

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

1. Terwujudnya, merupakan komitmen dan kehendak bersama mengenai kondisi yang diinginkan di masa mendatang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, maksudnya Bangsa Indonesia atau penduduk Kota Jambi yang terdiri dari berbagai suku dan etnis sudah seharusnya menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia akan tetap satu dan utuh.
3. Masyarakat Kota Jambi, yaitu masyarakat yang berada dalam wilayah Kota Jambi.
4. Stabilisasi Politik, merupakan situasi dan kondisi politik yang selalu stabil.
5. Pembinaan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah guna lebih menyempurnakan kondisi yang ada pada saat ini.
6. Masyarakat yang Berakhlak, yaitu masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang baik wilayah dalam Kota Jambi.

3.2. MISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Dalam upaya menjabarkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai, melalui misi ini akan memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam kepemimpinan organisasi sebagai pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat.
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas dan Parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
4. Meningkatkan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air pada masyarakat.

Dengan menjalankan strategi tersebut diharapkan apa yang menjadi rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan.

3.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut misi yang ingin dicapai Dengan demikian tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian keberhasilan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dimaksud untuk memberi arah dan fokusnya upaya yang dilaksanakan dalam mencapai misi.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasa aman, tertib dan berbudaya serta kondisi yang kondusif.
2. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatnya pendidikan politik, pemberdayaan Ormas, dan partai dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
4. Meningkatnya peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
5. Meningkatnya rasa cinta tanah air pada masyarakat.

3.4. SASARAN

Dengan berlandaskan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi serta memperhatikan potensi, permasalahan, peluang dan ancaman, maka dapat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya rasa aman, tertib dan berbudaya serta kondisi yang kondusif dalam Kota Jambi.
2. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tercapainya pendidikan politik, pemberdayaan Ormas, dan partai dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
4. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
5. Terciptanya rasa cinta tanah air pada masyarakat Kota Jambi.

3.5. STRATEGI

Strategi yang ditempuh dalam penyusunan rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah dengan memanfaatkan

peluang yang ada dan kekuatan yang dimiliki oleh badan saat ini sampai pada masa lima tahun kedepan, disamping memperhatikan kelemahan dari lingkungan internal serta ancaman dari pihak luar. Dengan menjalankan strategi tersebut diharapkan apa yang menjadi rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan.

3.6. KEBIJAKAN

Kebijaksanaan strategik merupakan strategi yang bersifat menyeluruh dan berperan sebagai penuntun kegiatan utama satu unit kerja dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Perumusan kebijaksanaan ini merupakan salah satu bentuk atau metode untuk pengambilan keputusan.

Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi serta berbagai hasil evaluasi dan analisa, maka dirumuskan kebijaksanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, yaitu:

1. Optimalisasi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam upaya persatuan dan kesatuan dengan prinsip kebersamaan.
4. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi antar instansi/SKPD terkait.
5. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana.

7. Pemberdayaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Penyusunan laporan terkait dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM

Program merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan kebijaksanaan strategik, Program strategik merupakan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijaksanaan. Satu program dapat mempunyai keterkaitan dengan salah satu sasaran atau lebih, namun sebaliknya dapat saja sasaran hanya dipenuhi melalui beberapa program.

Atas dasar faktor tersebut di atas, maka program strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini terutama bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan stabilitas politik didalam Kota Jambi, kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila, pemantauan harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan BBM serta lain-lain.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan PEMILU

Program ini bertujuan untuk memantapkan kehidupan politik dimasyarakat dalam kerangka demokrasi. Kegiatan-kegiatan yang utama pada program ini adalah menginventarisir/pendataan daftar mata pilih, menghimpun perolehan hasil suara PEMILU, mengumpulkan dan mengsisematiskan bahan serta data hasil PEMILU, sosialisasi Undang-Undang dibidang Politik, Pilkada dan lain sebagainya.

7. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Parpol dalam Memelihara dan Menjaga Trantibmas

Program ini bertujuan untuk memberi arahan dan pedoman organisasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga mampu menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif. Kegiatan-kagiatan pada program ini adalah memberikan tanda terdaftar keberadaan suatu organisasi masyarakat dan LSM, serta penyuluhan melalui tatap muka dengan tokoh masyarakat, LSM dan generasi muda.

1. Penentuan Aktivitas/Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana diinginkan, telah ditetapkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan jantung kehidupan keseharian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Jambi.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2013 mencakup:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
15. Pengadaan mebeleur
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
20. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
23. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
26. Penyusunan RENSTRA SKPD
27. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
28. Pengendalian keamanan lingkungan
29. Pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah
30. Tim terpadu penanganan gangguan keamanan

31. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Pengawasan orang asing dan lembaga asing)
32. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
33. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
34. Kelompok kerja pusat pendidikan kebangsaaan (Character Building)
35. Orientasi Wawasan Kebangsaan
36. Penataran Ketahanan Bangsa
37. Forum Pembauran Kebangsaan
38. Penyuluhan kepada masyarakat
39. Koordinasi forum-forum diskusi politik
40. Siaga Satlak Penanggulangan Bencana
41. Pemantauan Orkemas
42. Pembinaan pertanggung-jawaban bantuan keuangan bagi Parpol
43. Dukungan kelancaran penyelenggaraan PEMILU

5.2. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan merupakan serangkaian rencana yang harus dilaksanakan guna mewujudkan program-program yang telah dirumuskan, rencana kegiatan dari program strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian keamanan lingkungan
2. Pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah
3. Tim terpadu penanganan gangguan keamanan
4. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Pengawasan orang asing dan lembaga asing)
5. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
6. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
7. Kelompok kerja pusat pendidikan kebangsaaan (Character Building)

8. Orientasi Wawasan Kebangsaan
9. Penataran Ketahanan Bangsa
10. Forum Pembauran Kebangsaan
11. Penyuluhan kepada masyarakat
12. Koordinasi forum-forum diskusi politik
13. Siaga Satlak Penanggulangan Bencana
14. Pemantauan Orkemas
15. Pembinaan pertanggung-jawaban bantuan keuangan bagi Parpol
16. Dukungan kelancaran penyelenggaraan PEMILU

5.3. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui sampai sejauhmana kinerja yang telah dicapai oleh dinas setiap akhir tahun, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja itu sendiri. Sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan adalah sesuai dengan acuan yang telah diperoleh dari BPKP/LAN.

Adapun pedoman ini mencakup beberapa daftar indikator yang diukur berdasarkan bobot, yaitu :

1. Bobot antar indikator

Pada tahap ini setelah semua kegiatan ditentukan indicator kinerjanya seperti Inputs, Outputs, dan Outcomes, maka masing-masing indikator tersebut ditentukan pula bobotnya berdasarkan tingkat kesulitan dalam pencapaiannya, sehingga jumlah bobot antar indikator menjadi 100 (seratus) pada setiap kegiatan. Hal ini untuk menggambarkan tingkat kesulitan dari masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dalam mewujudkan berbagai kegiatan.

2. Bobot antar kegiatan

Bobot antar kegiatan merupakan tingkat kesulitan dalam mencapai hasil dari masing-masing kegiatan dan dalam penentuan bobot ini

jumlahnya juga harus 100 (seratus). Ini digunakan untuk melihat sampai sejauhmana hasil yang dicapai dari masing-masing kegiatan yang telah diprogram.

3. Bobot antar program

Setelah dilakukan pengukuran kinerja antar indikator dan antar kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan bobot setiap program dari satu kebijaksanaan, sehingga jumlahnya menjadi 100 (seratus). Manfaatnya adalah untuk mengetahui tingkat capaian program dalam mewujudkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Bobot antar Kebijaksanaan

Pada tahap akhir pengukuran kinerja adalah dengan menetapkan bobot pada setiap kebijaksanaan yang diambil sehingga jumlahnya menjadi 100 (seratus) dan pada akhirnya didapat hasil atau sasaran yang ingin dicapai oleh dinas pada setiap tahunnya.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp(1.000)	target	Rp(1.000)	target	Rp(1.000)	Target	Rp(1.000)	Target	Rp(1.000)	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya kinerja pegawai		Terciptanya kerja yang baik	Persentase administrasi perkantoran yang tertib dan prima di Lingkungan Dinas Perindag Kota Jambi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang tertib dan prima di Lingkungan Badan Kesbangpol Kota Jambi	100%	100%	548,475.5	100%	373,936.5	100%	389,937.5	100%	374,437.5	100%	374,437.5	100%		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat	12 bln	12 bln	6.150	12 bln	6.750	12 bln	6.750	12 bln	6.750	12 bln	6.750	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik sesuai kebutuhan	12 bln	12 bln	40.200	12 bln	40.200	12 bln	43.300	12 bln	40.200	12 bln	40.200	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/oprasional	Terlaksananya pembayaran pembayaran pajak kendaraan bermotor	4 mobil, 9 motor	4 mobil, 9 motor	7.800	4 mobil, 9 motor	7.800	5 mobil, 9 motor	7.800	5 mobil, 11 motor	7.800	5 mobil, 11 motor	7.800	5 mobil, 11 motor		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	12 bln	12 bln	104.215	12 bln	120.240	12 bln	120.240	12 bln	120.240	12 bln	120.240	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bln	12 bln	40.000	12 bln	58.800	12 bln	60.800	12 bln	58.800	12 bln	58.800	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Penyediaan Jasa Perbaikan Alat	Tersedianya jasa mesin tik, laptop, komputer	12 bln	12 bln	9.800	12 bln	12.300	12 bln	14.700	12 bln	12.300	12 bln	12.300	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota

						Kantor	dan printer														Jambi
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang mendukung tertib administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	27.000	12 bln	26.499	12 bln	35.000	12 bln	27.000	12 bln	27.000	12 bln	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung tertib administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	15.587,5	12 bln	15.587,5	12 bln	15.587,5	12 bln	15.587,5	12 bln	15.587,5	12 bln	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor untuk kenyamanan pelaksanaan tugas perkantoran		12 bln	2.900	12 bln	2.900	12 bln	2.900	12 bln	2.900	12 bln	2.900	12 bln	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung kelancaran bekerja		4 printer, 1 UPS, 1 antena penguat Wifi, 1 alat perekam	40.193		0		0		0		0	4 printer, 1 UPS, 1 antena penguat Wifi, 1 alat perekam	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor		1 rak piring	3.600		0		0		0		0	1 rak piring		Kota Jambi
						Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan sumber pengetahuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan		3 koran, 1 majalah	6.480	3 koran, 1 majalah	6.960	3 koran, 1 majalah	6.960	3 koran, 1 majalah	6.960	3 koran, 1 majalah	6.960	3 koran, 1 majalah	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat yang dapat mendukung produktivitas dalam bekerja		12 bln	9.900	12 bln	9.900	12 bln	9.900	12 bln	9.900	12 bln	9.900	12 bln	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Tersedianya fasilitas yang dapat mendukung kelancaran dalam		12 bln	188.650		0		0		0		0		12 bln	Kota

					Daerah	mendapatkan pengetahuan baru, konsultasi dan koordinasi kedinasan														Jambi
					Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terciptanya keamanan kantor		12 bln	46.000	12 bln	66.000	12 bln	66.000	12 bln	66.000	12 bln	66.000		12 bln	Kota Jambi
					Perjalanan Dinas	Tersedianya fasilitas yang dapat mendukung kelancaran dalam mendapatkan pengetahuan baru, konsultasi dan koordinasi kedinasan				12 bln	225.000	12 bln	250.000	12 bln	225.000	12 bln	225.000		12 bln	Kota Jambi
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		Terciptanya kerja maksimal	Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur	100%	100%	158.300											
					Pengadaan mebeuler	Tersedianya mebeuler yang memadai	-	3 kursi putar, 1 kursi tamu	34.200		0		70.000		0		0	3 kursi putar, 1 kursi tamu	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pengecatan gedung dan pagar	Pengecatan gedung dan pagar	10.600	Pengecatan gedung dan pagar	9.075	Pengecatan gedung dan pagar	9.075	Pengecatan gedung dan pagar	15.000	Pengecatan gedung dan pagar	15.000	Pengecatan gedung dan pagar	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	12 bln	12 bln	89.800	12 bln	124.030	12 bln	150.000	12 bln	150.000	12 bln	150.000	12 bln	Badan Kesbangpol	Kota Jambi
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 AC	10 AC	16.700		0		0		0		0	10 AC	Badan Kesbangpol	Kota Jambi

						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	2 AC	7.000		0		0		25.000		25.000	2 AC		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-				0	1 mobil	580.000		0		0	1 AC		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terciptanya kelancaran bekerja dengan peralatan yang memadai	-			1 komputer PC, 2 laptop, 1 printer, 1 CPU, 1 proyektor, 1 televisi beserta kelengkapanny a	52.883,2	1 laptop	30.000		0		0	1 komputer PC, 3 laptop, 1 printer, 1 CPU, 1 proyektor, 1 televisi beserta kelengkapanny a		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bln			12 bln	4.950	12 bln	4.950	12 bln	8.000	12 bln	8.000	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya tempat kerja yang memadai	-				0	Rehab tempat parki dan ruangan kantor	350.000		0		0	Rehab tempat parki dan ruangan kantor		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatnya disiplin aparatur		Terciptanya keseragaman dalam berpakaian	Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	100%	100%	14.800	100%	19.000	100%	38.000	100%	19.000	100%	38.000	100%		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya atau Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang sesuai ketentuan	Seluruh pegawai	Seluruh pegawai	14.800	Seluruh pegawai	19.000	Seluruh pegawai	19.000	Seluruh pegawai	0	Seluruh pegawai	19.000	Seluruh pegawai		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
			Persentase aparatur yang memiliki kapasitas,			Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	100%	100%	24.400	100%	24.400	100%	19.000	100%	24.400	100%	19.000	100%		Badan Kesbangpol	

			profesionali- tas dalam melaksanakan kinerja			Daya Aparatur															Kota Jambi	
						Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bintek dalam dan luar daerah	12 bln	12 bln	24.400	12 bln	24.400	12 bln	24.400	12 bln	24.400	12 bln	24.400	12 bln		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
			Persentase laporan yang tepat waktu			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja & Keuangan	Ratio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional	100%	100%	18.717	100%	13.717	100%	13.717	100%	18.717	100%	18.717	100%		Badan kesbangpol	Kota Jambi
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP dan Laporan Tahunan)	5 dok	5 dok	10.000	5 dok	5.000	5 dok	5.000	5 dok	10.000	5 dok	10.000	25 dok		Badan Kesbangpol	Kota Jambi
						Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)	Tersedianya laporan ILPPD	1 dok	1 dok	8.717	1 dok	8.717	1 dok	8.717	1 dok	8.717	1 dok	8.717	5 dok		Badan kesbangpol	Kota Jambi
			Persentase dokumen perencana-an dan penganggaran SKPD yang efektif, terukur dan akuntabel sebagai pedoman pelaksana-an program dan			Program Penyusunan Perencanaan SKPD	Persentase perencanaan dan penganggaranSKPD yang efektif, terukur dan akuntabel sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan	100%	100%	28.050	100%	12.906	100%	12.906	100%	12.906	100%	12.906	100%		Badan kesbangpol	Kota Jambi

			kegiatan																		
						Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunnya Renstra Badan Kesbangpol	-	1 dok	16.050		0		0		0		0	1 dok	Badan kesbangpol	Kota Jambi
						Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya RUP, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol	3 dok	3 dok	12.000	3 dok	12.906	3 dok	12.906	3 dok	12.906	3 dok	12.906	15 dok	Badan kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta kondisi yang kondusif	Terlaksananya keamanan dan ketertiban serta kondisi yang kondusif	Terciptanya keamanan dan ketertiban serta kondisi yang kondusif dalam Kota Jambi	Adanya rasa aman dan tertib serta kondisi yang kondusif dalam Kota Jambi			Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Keamanan Masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman lingkungan masyarakat	20%	20%	323.642								20%	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
						Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya rasa aman, damai, nyaman dan tenteram pada masyarakat		2 kali rapat dan pemantauan	67.948								2 kali rapat dan pemantauan	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
						Koordinasi Penanganan Konflik	Memudahkan dalam penyelesaian konflik		4 kali rapat	189.595								4 kali rapat	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
						Koordinasi Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Terpantaunyan kondisi ketahanan ekonomi masyarakat		4 kali rapat 5 kali pemantauan	66.098,7								4 kali rapat 5 kali pemantauan	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
			Adanya rasa nyaman di Kota Jambi			Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat			56.685										Kota Jambi	
						Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan (Pengawasan orang/ lembaga asing)	Terkendalnya pengawasan terhadap orang/ lembaga asing		2 kali pemantauan	56.685								2 kali pemantauan	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
			Terdapatnya sinergisitas antar pimpinan daerah			Peningkatan Pelaksanaan Kedinasan KDH/WKDH	Terselenggaranya pelaksanaan kedinasan KDH/WKDH			352.403										Kota Jambi	
						Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi pimpinan daerah		8 kali rapat	96.062								8 kali rapat	Badan kesbangpol	Kota Jambi	
			Terdapatnya kerukunan antar umat			Pengembangan Wawaasan Kebangsaan	Meningkatnya rasa cinta bangsa			256.341										Kota Jambi	

			beragama																	
							3 kali rapat, 4 kali pemantauan	137.600									3 kali rapat, 4 kali pemantauan		Badan kesbangpol	Kota Jambi
							40 orang masyarakat, 15 anggota tim, TOGA dan TOMASY, 3 kali pemantauan	118.741									40 orang masyarakat, 15 anggota tim, TOGA dan TOMASY, 3 kali pemantauan		Badan kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Adanya persatuan dan kesatuan di Kota Jambi			Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan yang berorientasi wawasan kebangsaan													Kota Jambi
							40 orang Masyarakat	32.017									40 orang Masyarakat		Badan kesbangpol	Kota Jambi
							2 kali pemantauan	54.733									2 kali pemantauan		Badan kesbangpol	Kota Jambi
							80 orang Es.III	179.560									80 orang Es.III		Badan kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatnya Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas dalam memelihara dan mewujudkan stabilitas politik Kota Jambi	Terlaksananya pendidikan politik, pemberdayaan ormas dalam memelihara dan mewujudkan stabilitas politik Kota Jambi	Tercapainya Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas dalam memelihara dan mewujudkan stabilitas politik Kota Jambi	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan politik masyarakat			Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	20%		20%	975.850						20%		Badan kesbangpol	Kota Jambi
							50 orang masyarakat dan aparatur	100.000									50 orang masyarakat dan aparatur		Badan kesbangpol	Kota Jambi
							4 kali rapat	100.000									4 kali rapat			Kota Jambi

						Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu		1 kali pemilu legislatif dan 1 kali pemilu presiden dan wakil presiden	875.850								1 kali pemilu legislatif dan 1 kali pemilu presiden dan wakil presiden		Badan kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Terciptanya partisipasi dan ketertiban masyarakat	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Adanya Orkemas dan Parpol yang dapat bekerjasama dalam proses pembangunan		Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol dalam Memelihara dan Menjaga Trantibmas	Meningkatnya kerjasama Ormas dan Parpol dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan	20%	20%	185.000								20%		Badan kesbangpol	
						Pemantauan Orkemas		1 kali rapat, 20 kali pemantauan	110.000								1 kali rapat, 20 kali pemantauan		Badan kesbangpol	Kota Jambi
						Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol		12 parpol	75.000								12 parpol		Badan kesbangpol	Kota Jambi
Meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Terciptanya keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	kondisi yang aman nyaman, bersatu padu di Kota Jambi		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Jambi	20%	20%												
						Fasilitasi, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan		6 kali rapat, 3 kali pemantauan, 120 orang implementasi FKDM	700.000	6 kali rapat, 3 kali pemantauan, 180 orang implementasi FKDM 2 kali sosialisasi tentang WNA	320.000	6 kali rapat, 3 kali pemantauan, 180 orang implementasi FKDM 2 kali sosialisasi tentang WNA	335.000	6 kali rapat, 3 kali pemantauan, 180 orang implementasi FKDM 2 kali sosialisasi tentang WNA	340.000	6 kali rapat, 3 kali pemantauan, 180 orang implementasi FKDM 2 kali sosialisasi tentang WNA			Badan kesbangpol	Kota Jambi
						-Pengendalian Keamanan Lingkungan			200.000											Kota Jambi
						-Pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah			300.000											Kota Jambi
						-Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan			200.000											Kota Jambi

						dalam Teknik Pencegahan Kejahatan															
						Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah				8 kali rapat	300.000	4 kali rapat	180.000	4 kali rapat	190.000	4 kali rapat	190.000	20 kali rapat		Badan kesbangpol	Kota Jambi
Mewujudkan peningkatan kerukunan kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan kehidupan beragama	Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	penyelesaian masalah keagamaan			Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi				21 kali rapat, 1 kali soaialisasi	600.000	20 kali rapat, 1 kali soaialisasi	350.000	20 kali rapat, 1 kali soaialisasi	370.000	20 kali rapat, 1 kali soaialisasi	380.000	81 kali rapat, 4 kali soaialisasi		Badan kesbangpol	Kota Jambi
						-Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama					200.000		160.000		165.000		170.000				Kota Jambi
						-Fasilitasi Peran Pemda dan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah					200.000		70.000		75.000		80.000				Kota Jambi
						-Koordinasi Ketahanan Ekonomi Masyarakat					200.000		120.000		130.000		130.000				Kota Jambi
						Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				7 dok	1.675.000	7 dok	900.000	7 dok	985000	7 dok	1.025.000	28 dok		Badan kesbangpol	Kota Jambi
						-Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat					300.000										Kota Jambi
						-Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi					175.000										Kota Jambi
						-Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian					175.000										Kota Jambi
						-Orientasi Wawasan Kebangsaan					200.000										Kota Jambi
						-Forum Pembauran Kebangsaan					200.000										Kota Jambi
						-Pendidikan Wawasan					200.000										Kota Jambi

Jambi, Januari 2017
Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi

LIPHAN PASARIBU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590912 198002 1 001

BAB V

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Kota Jambi Tahun 2013-2018 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan dari sejumlah program secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada peningkatan karakter masyarakat yang mempunyai wawasan kebangsaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan memiliki rasa cinta tanah air demi mewujudkan Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Kota Jambi Tahun 2013-2018 memuat tujuh program utama sebagai implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan dikelompokkan dalam empat sorotan aspek dengan rencana program-program prioritas yang diindikasikan sebagai solusi dalam rangka pencapaian tujuan melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Ada tujuh program yang utama dalam periode lima tahun mendatang, yaitu:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dengan implementasi program ini diharapkan terdapatnya kondisi yang kondusif Kota Jambi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat mengajak masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan dan melakukan pemantauan harga sembilan bahan pokok, BBM dan bahan strategis lainnya. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan mampu untuk mengetahui secara dini permasalahan-

permasalahan yang mungkin timbul dan dapat segera diselesaikan secara baik melalui koordinasi tim yang ada dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini terutama bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan stabilitas politik didalam Kota Jambi, kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan rukun antar umat beragama dan antar umat pemeluk agama yang berbeda. Dengan adanya program ini diharapkan masing-masing pemeluk agama dapat memahami arti kebersamaan dalam menciptakan kondisi yang nyaman sehingga dalam beribadah dapat dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan.

4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan menciptakan kondisi politik Kota Jambi yang kondusif dengan sosialisasi dan koordinasi partai politik, Ormas dan masyarakat yang mampu membangun kerjasama melalui dialog dan pendidikan politik.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan PEMILU

Program ini bertujuan untuk memantapkan kehidupan politik dimasyarakat dalam kerangka demokrasi. Kegiatan-kegiatan yang utama pada program ini adalah menginventarisir/pendataan daftar mata pilih, menghimpun perolehan hasil suara PEMILU, mengumpulkan dan mengsisematiskan bahan serta data hasil PEMILU, sosialisasi Undang-Undang dibidang Politik, Pilkada dan lain sebagainya.

7. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Parpol dalam Memelihara dan Menjaga Trantibmas.

Untuk tahun 2015 sampai dengan saat ini program pada Badan Kesbangpol Kota Jambi hanya terdiri dari 2 program yaitu: hanya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Parpol dalam Memelihara dan Menjaga Trantibmas.

Program ini bertujuan untuk memberi arahan dan pedoman organisasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga mampu menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif. Kegiatan-kagiatan pada program ini adalah memberikan tanda terdaftar keberadaan suatu organisasi masyarakat dan LSM, serta penyuluhan melalui tatap muka dengan tokoh masyarakat, LSM dan generasi muda.

Indikasi rencana program-program utama tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Kota Jambi Tahun 2013-2018. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Komponen belanja tidak langsung meliputi: belanja pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program utama.

Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program utama yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program utama diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BAB VII

P E N U T U P

Rencana pembangunan strategik lima tahunan sebagai suatu dokumen perencanaan yang berorientasi kepada visi dan misi dalam pelaksanaannya memerlukan kesungguhan dan kehendak yang kuat dari seluruh aparatur pemerintah yang didukung oleh masyarakat secara sadar dan terus menerus berupaya mewujudkannya. Begitu pula dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

Visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan bagian dari turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2013-2018. Visi dan Misi ini merupakan suatu pedoman, nilai dan sekaligus semangat pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam lima tahun kedepan untuk menciptakan stabilitas politik dalam masyarakat. Karena itu visi dan misi yang dibuat perlu disosialisasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memasyarakatkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi secara berjenjang, mulai dari tingkat pimpinan yang lebih tinggi, menengah dan kebawah sampai kepada masyarakat.
2. Dalam melakukan sosialisasi visi dan misi tersebut, para pimpinan harus terlebih dahulu menguasainya dengan baik dan benar untuk disampaikan kepada bawahannya maupun masyarakat sehingga sosialisasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti.

3. Sosialisasi visi harus dilakukan berulang-ulang, karena proses pemahaman visi membutuhkan waktu untuk benar-benar dipahami.

Selanjutnya dalam memahami perencanaan strategik ada tiga aspek yang menjadi landasan berpikir yaitu : perubahan paradigma (paradigm shift), perubahan pengelolaan (management of change) dan strategi (strategy).

1. Paradigm shift, bahwa dalam berfikir strategis memerlukan pemahaman adanya paradigma yang baru mengenai sisi pandang bidang manajemen yang dihadapi.
2. Management of change, bahwa dalam berfikir strategis memerlukan pemahaman mengenai terjadinya perubahan-perubahan eksternal maupun internal, mengenai perubahan-perubahan yang bisa dibayangkan (vision), keterampilan yang harus disiapkan (skill), dukungan apa yang bisa didapat (insentive), sumber daya (resources) dan rencana tindakan dalam mengantisipasi maupun menciptakan perubahan (action plan).
3. Strategy, dalam melakukan tindakan strategis memerlukan konsolidasi tiga unsur yang terkait yaitu manusia (people), alat (technology) dan proses (process) yang ketiganya dirangkum dalam tindakan operasi.

Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kesepakatan (commitment) dari semua pihak untuk secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya mewujudkan visi dan misi tersebut. Melalui perubahan pola tingkah (behavioral), pola pikir (intellectual) dan pola tindak (managerial) yang benar diharapkan visi pembangunan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi secara bertahap dapat diwujudkan.

Jambi, Januari 2017

Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi

LIPHAN PASARIBU, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590912 198001 1 001